



Pemprov Didesak Ambil Alih JIS dan TIM

◆ Imbas Ditemukan Buruknya Catatan Keuangan

JAKARTA (Poskota)

- Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak minta pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS) dan Taman Ismail Marzuki (TIM) segera diambil alih Pemprov DKI lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Seperti diketahui, JIS dan TIM memang milik Pemprov DKI, namun pengelolannya diserahkan kepada BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Namun hal itu menyebabkan catatan merah dari laporan keuangan Jakpro yang harus membayar seluruh biaya operasional, perawatan, hingga penyusutan aset dua proyek yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan itu.

"Tindak lanjut pengelolaan JIS dan TIM yang sarat beban karena tidak berorientasi untung sepatutnya digeser ke Pemprov. Pengelolaan TIM bisa diserahkan kepada Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI. Sedangkan JIS bisa diurus oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI," kata Gilbert yang dikutip, Minggu (6/8).

Dengan pengambilalihan itu, kata Gilbert, Jakpro yang notabene merupakan BUMD bisa fokus dalam

satu bidang tanpa perlu memikirkan pengelolaan infrastruktur yang dibuatnya. "BUMD perlu dibuat fokus, seperti membuat holding, misalnya pangan, transportasi, atau infrastruktur," ujarnya.

Lewat cara ini, lanjut Gilbert, Jakpro juga bisa leluasa mencari keuntungan dari proyek-proyek yang dikerjakannya. Sehingga Pemprov DKI juga bisa meraup untung dari dividen

DPRD DKI pada Kamis (3/8) kemarin. Ia menyinggung soal penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang digunakan untuk menggarap sejumlah proyek besar di era Gubernur Anies Baswedan.

"Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD itu," tuturnya.

Hal ini yang kemudian menjadi masalah besar lantaran Jakpro harus menanggung seluruh biaya operasional, perawatan, hingga penyusutan aset JIS dan TIM. Di sisi lain, JIS dan TIM belum bisa dioptimalkan pemanfaatan komersialnya sehingga Jakpro selama ini harus terus menanggung rugi.

"Karena ini tidak dioperasionalkan dan dimanfaatkan secara maksimal, akhirnya menjadi beban korporasi dan menjadi tidak untung alias rugi," kata Joko Agus.

Oleh karena itu, Joko Agus sempat mengeluarkan pernyataan cukup menohok dengan menyebut JIS dan TIM sudah salah sejak lahir. "Jadi memang kami mengakui bahwa TIM dan JIS itu salah dari lahirnya," tuturnya. (*/lfn)

Penugasan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta itu memberikan PMD dan kemudian akhirnya aset dan sebagainya itu menjadi miliknya BUMD itu

yang diberikan perusahaan pelat merah itu.

"Sifat BUMD sebagai Perseroan Terbatas (PT) itu berorientasi untung, jadi ganjil kalau kegiatan yang tidak menguntungkan seperti (mengelola) Velodrome, TIM, JIS, dan lainnya dibebankan kepada BUMD yang berbentuk PT," ungkapnya.

Masalah pengelolaan JIS dan TIM oleh Jakpro ini sempat diungkit Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono dalam rapat Badan Anggaran